

RENCANA AKSI TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					KETERANGAN
				2024	TW I	TW II	TW III	TW IV	
I	TUJUAN: Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip- prinsip Good Governance melalui Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE	Indeks	3.50	0	0	0	3.50	Penilaian dari BSSN pada awal tahun berikutnya (TUJUAN)
I.A.	SASARAN: Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	94	0	0	0	94	Penilaian dari Komisi Informasi Publik pada akhir tahun berjalan
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase OPD yang memiliki Website Informatif	Persen	100%	30	60	90	100	PROGRAM
1.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Informasi Publik Pemerintan Daerah Kab/Kota	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
1.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi oleh media Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
1.1.2.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
1.1.3.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terbinanya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
1.1.4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terbinanya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan kemitraan komunikasi	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	PROGRAM
2.1.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika - Indeks SPBE	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
2.1.1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
2.2.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
2.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
2.2.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN

I.B.	SASARAN: Meningkatnya ketersediaan Data pada Portal Satu Data Daerah yang dapat diakses Masyarakat	Presentase Ketersediaan Data Pada Portal Satu Data Daerah	Persen	40%	30%	60%	90%	100%	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	PROGRAM
3.1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
3.1.1.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata Statistik sektoral yang dihimpun	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
3.1.2.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
I.C.	SASARAN: Meningkatnya Keamanan Informasi	Presentase Pengamanan Informasi Daerah	Poin	315	0	0	0	315	Penilaian dari BSSN pada awal tahun berikutnya
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	PROGRAM
4.1.	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
4.1.1.	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
4.1.2.	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
4.2.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
4.2.1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
I.D.	SASARAN: Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinkominfo	Nilai SAKIP Dinkominfo	Persen	72,76	30	60	90	100	Penilaian dari Inspektorat
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja -Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	PROGRAM
5.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja -Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
5.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN

5.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang meneri gaji dan tunjangan ASN	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.2.3.	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
5.3.1.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.3.2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang Pemerintah Daerah	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
5.4.1.	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.4.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.4.3.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan jamuan tamu dalam memfasilitasi kunjungan tamu	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.4.4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.4.5.	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.5.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
5.5.1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
5.6.1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.6.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.6.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	KEGIATAN
5.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
5.7.1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN

5.7.1.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persen	100%	30%	60%	90%	100%	SUB KEGIATAN
--------	---	--	--------	------	-----	-----	-----	------	--------------

Purbalingga, Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M.
NIP 19650519 198803 2 006